

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan didisiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang teroganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relative baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Di amerika serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan public yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Rukminto (2005:17), Kesejahteraan sosial adalah:

Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup

(kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

Pengertian di atas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Merujuk kepada undang-undang No.11 tahun 2009 yang dikutip oleh Suharto (2009:153) mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya”.

Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, spiritual, dan sosial sehingga akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya harus ditingkatkan.

Ilmu kesejahteraan sosial merupakan kelanjutan dan sebuah penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh Karena itu latar belakang sejarah dari ilmu kesejahteraan sosial pada titik awal masihlah sama dengan pekerjaan sosial. Adapun definisi pekerjaan sosial menurut *Internasional Federation of Social Workers* (IFSW) (2000) yang dikutip oleh Adi (2005:12) adalah:

The social worker profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behavior and social systems,

social work intervenes at the points where people interact with the environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.

Profesi pekerjaan sosial mendorong agar terciptanya perubahan sosial, membantu dalam pemecahan masalah pada relasi manusia, serta memberdayakan dan membebaskan manusia untuk mencapai derajat suatu kehidupan yang lebih baik. Upaya yang dilakukan tersebut dilakukan dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi ketika seseorang sedang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja sosial.

Pekerjaan sosial adanya kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat sebagai biasanya. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Zastrow yang dikutip oleh Huraerah (2011:38) yang mengatakan definisi pekerjaan sosial adalah :

Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, permasalahan dalam bidang pekerjaan sosial erat kaitannya dengan masalah sosial yang dihadapi baik oleh individu, kelompok dan juga masyarakat. Peran pekerja sosial mampu mengatasi semua bentuk permasalahan dan fenomena sosial tersebut dengan melihat prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial serta mampu memperbaiki kualitas hidup dan mampu mengembalikan fungsi sosialnya kembali di masyarakat.

Pekerjaan sosial memiliki metode-metode yang dapat digunakan bersama-sama dan dapat saling melengkapi dalam proses penyelesaian. Dalam permasalahan perilaku remaja ini pekerja sosial dapat menggunakan metode utama pekerjaan sosial yaitu Social Case Work, dan Social Group Work.

1. Bimbingan Sosial Perseorangan (*Social Case Work*), menurut Friendlander yaitu cara menolong seseorang dalam konsultasi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan penyesuaian sosialnya sehingga memungkinkan mencapai kehidupan yang memuaskan dan bermanfaat.
2. Bimbingan Sosial Kelompok (*Social Group Work*), yaitu suatu metode untuk bekerja menghadapi orang-orang dalam suatu kelompok, guna meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial serta pencapaian tujuan yang dianggap baik.

Melalui bimbingan sosial persorangan, pekerja sosial akan lebih efektif untuk memahami dan mengerti tentang klien yang memiliki potensi dan masalah. Pekerja sosial dapat mengeksplorasi keunikan dan keunggulan serta masalah yang sedang dihadapi klien untuk menyelesaikan suatu masalah secara lebih efektif dan dijamin kerahasiaannya.

Melalui bimbingan sosial kelompok, pekerja sosial dapat menggunakan kelompok sebagai media intervensi secara efektif dalam membentuk kepribadian klien, mengetahui minat dan bakat klien, masalah yang dihadapi klien melalui pendekatan kelompok sebagai media dalam melakukan intervensi keterampilan dan keahlian pekerja sosial secara efektif dan komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui ciri-ciri pokok bimbingan sosial masyarakat sebagai berikut :

1. Istilah bimbingan sosial masyarakat diartikan baik sebagai proses maupun sebagai bidang praktek.
2. Proses pengorganisasian suatu masyarakat dapat merupakan bagian dari pekerjaan sosial, tapi juga dapat merupakan kegiatan diluar pekerjaan sosial.
3. Proses bimbingan organisasi masyarakat dapat dilaksanakan oleh organisasi sebagai fungsi primer dan sebagai fungsi sekunder.
4. Proses bimbingan organisasi masyarakat tidak hanya dapat dilaksanakan pada tingkat desa ketetangaan, tapi juga pada tingkat daerah propinsi dan nasional.
5. Bahwa lembaga-lembaga yang melaksanakan bimbingan sosial masyarakat sebagai fungsi pimernya tidak memberikan bantuan atau pelayanan kepada klien secara langsung.

1. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin (2012:10) Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

- (1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, [erumahan , pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- (2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Schneiderman (1972) dalam Menurut Fahrudin (2012:10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan system, pengawasan system, dan perubahan system.

a) Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan system kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan system rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

b) Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

c) Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota

masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

2. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial menurut Fahrudin (2012:12) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercangkup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Support*)

Fungsi ini mencangkup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Melihat kutipan di atas bahwa adanya fungsi dalam kesejahteraan sosial, untuk membantu atau proses pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat agar

dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan dari sosio-ekonomi.

3. Pelayanan Sosial

a. Pengertian Pelayanan Sosial

Tekanan telah berubah dari usaha sosial yang bersifat rehabilitasi kepada orang-orang miskin, dari usaha kesejahteraan anak dan keluarga tradisional, usaha probasi dan usaha-usaha kllis kepada pendidikan. Usaha-usaha tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) atau dengan mengurangi kesulitan dalam fungsionalitas pribadi, masyarakat dapat ditingkatkan kondisi kehidupannya. Pelayanan sosial kemudian berkembang dan mencakup kesehatan, pendidikan, perumahan, demikian juga program kesejahteraan masyarakat. Adapun definisi mengenai pelayanan sosial menurut Huraerah (2011:45) adalah :

Kegiatan terorganisir yang ditujukan untuk membantu warga Negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta usia lanjut terlantar atau mengalami bentuk kecacatan.

Pelayanan sosial merupakan istilah yang tidak mudah dijelaskan, selain itu pengertian pelayanan sosial tidak sama untuk Negara yang berbeda. Di Inggris misalnya, istilah itu digunakan untuk pelayanan servis dan manfaat benefit yang berorientasi orang. Apabila mengutip dari Romanyshyn (1971) yang dikutip oleh Fahrudin (2012:51) mendefinisikan pelayanan sosial adalah :

Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu dan keluarga-keluarga melalui 1. Sumber-sumber sosial pendukung, dan 2. Proses-proses meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Melihat definisi di atas bahwa adanya penyelenggaraan pelayanan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan keberfungsian sosial seseorang agar kembali seperti biasanya dan memperbaiki kualitas kehidupan dengan sumber pendukung yang memadai. Maka jelas pelayanan sosial dibutuhkan seiring modernisasi dewasa ini agar mampu membantu orang yang memiliki permasalahan sosial.

b. Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang di masa lampau menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Perkembangan pelayanan sosial yang sangat cepat, motivasi yang beraneka ragam, diantara para penyusunnya dan besarnya beban kasus maupun tenaga yang terlibat di dalamnya menyebabkan perlunya menggunakan pelayanan. Pelayanan sosial cenderung menjadi pelayanan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus. Menurut Fahrudin (2012:54) menjelaskan tentang fungsi-fungsi pelayanan sosial adalah :

1. Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan
2. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.

3. Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat.

Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga mereka dapat berkembang dan mereka bisa mendapatkan sebuah perlindungan. Selain itu dengan adanya pelayanan sosial masyarakat bisa mendapatkan akses, informasi dan nasihat yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

B. Metode Pekerjaan Sosial

Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Penanganannya dari permasalahan individu, kelompok, dan masyarakat. Metode yang digunakan oleh peksos sebagai berikut :

a. Bimbingan Sosial Perorangan (*Social Case Work*)

Bimbingan sosial perorangan menurut Swift yang dikutip oleh Muhudin (1992:11) adalah seni untuk membantu individu dalam mengembangkan dan menggunakan kemampuan pribadinya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan sosialnya.

Berdasarkan definisi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial. Seorang pekerja sosial harus bisa menangani masalah yang didapat individu tersebut melalui pendekatan untuk mengembangkan dan memecahkan masalah individu tersebut. Dalam memecahkannya seorang peksos harus mempunyai keahlian dan keterampilan dalam relasi pekerja sosial dengan klien.

Prinsip dasar pada bimbingan sosial perseorangan adalah:

1. Penerimaan, seorang pekerja sosial harus mau menerima dan menghormati penerima pelayanan (klien) dalam setiap kondisi yang dialaminya.
2. Komunikasi, antara pekerja sosial dan klien harus saling memberi dan menerima informasi.
3. Individualisasi, pekerja sosial harus memahami, menerima bahwa klien sebagai pribadi yang unik, dalam arti berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya.
4. Partisipasi, pekerja sosial harus ikut serta secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan klien.
5. Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu merahasiakan informasi yang diberikan oleh klien.
6. Kesadaran diri, sebagai manusia pekerja sosial menyadari akan respon klien serta motivasi dan relasi bantuan profesional.

b. Bimbingan Sosial Kelompok (Social Group Work)

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Jadi bimbingan sosial kelompok digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok/lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu atau membantu kelompok mencapai tujuannya. Bimbingan sosial kelompok menurut Tacter yang dikutip oleh Muhidin (1992:11) menyatakan bahwa :

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu metode dimana individu-individu kelompok dari lembaga sosial dibantu oleh seorang pekerja sosial atau petugas yang membimbing interaksi didalam program kegiatan sehingga mereka dapat menghubungkan diri dengan satu yang lain dan kesempatan untuk mengembangkan pengalamannya selaras dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk tujuan mengembangkan individu, kelompok dan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas individu-individu yang mempunyai permasalahan yang sama dibentuk menjadi kelompok. Pekerja sosial membimbing kelompok tersebut untuk mengembangkan interaksi satu sama lain sehingga terciptanya keselarasan kebutuhan yang ingin dipenuhi kelompok tersebut dalam pemecahan masalahnya. Prinsip dasar pada bimbingan sosial kelompok adalah :

1. Pembentukan kelompok secara terencana. Kelompok merupakan satu kesatuan dimana individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan pribadinya. Kelompok yang telah terbentuk, maka badan sosial yang menerima kelompok dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan situasi kelompok, terutama yang dapat memberikan kemungkinan untuk

perkembangan individu menuju ke arah positif dalam pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok.

2. Memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Di dalam bimbingan sosial kelompok tujuan, perkembangan individu dan kelompok harus dirumuskan dengan cermat oleh pembimbing kelompok agar terdapat keserasian antara harapan dan kemampuan kelompok.
3. Penciptaan interaksi terpimpin. Dalam bimbingan sosial kelompok harus dibina hubungan yang bertujuan antara pekerja sosial dengan anggota-anggota kelompok dan atas dasar keyakinan bahwa pekerja sosial akan menerima anggota kelompok sebagaimana adanya.
4. Pengambilan keputusan. Kelompok harus dibantu dalam mengambil keputusan-keputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya.
5. Organisasi bersifat fleksibel dalam arti organisasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Organisasi yang formal harus fleksibel dan harus didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang penting, yang dipahami oleh para anggotanya dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.
6. Penggalian sumber-sumber dan penyusunan program. Sumber yang ada di masyarakat harus dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman kelompok, untuk dimanfaatkan para anggota dan kelompok itu sendiri. Penilaian kegiatan secara terus-menerus terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan kelompok

yang merupakan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang diselesaikan masing-masing pihak untuk keseluruhan.

3. Bimbingan Sosial Masyarakat

Bimbingan sosial dengan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak dan lain sebagainya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah:

1. Penyusunan program didasarkan kebutuhan nyata yang mendesak di masyarakat.
2. Partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.
3. Bekerja sama dengan berbagai badan dalam rangka keberhasilan bersama dalam pelaksanaan program.
4. Titik berat program adalah upaya untuk pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, pengembangan dan dukungan

C. Intervensi Pekerjaan Sosial

Kehadiran profesi pekerjaan sosial di tenggah-tengah masyarakat tidak lain adalah bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu kelompok, maupun masyarakat yang kemudian setiap kegiatannya difokuskan kepada hubungan sosial klien yang melakukan interaksi dengan lingkungan dimana mereka hidup. Hal

ini sejalan dengan pendapat Soetarso dalam Huraerah (2011:39) yang mengemukakan bahwa:

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal-balik yang saling menguntungkan antara orang dan lingkungan sosialnya (perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat) untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai satu kesatuan yang harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Berkenaan dengan pernyataan tersebut, maka terdapat keterkaitan yang cukup erat antara pelaksanaan advokasi dengan profesi pekerjaan sosial, karena dibentuknya sebuah lembaga Sinergi Foundation dengan kegiatan advokasi bebas rentenir ialah agar membantu mustahik yang sedang dihadapkan pada suatu permasalahan agar dapat diselesaikan permasalahannya dengan mempertahankan hak-hak yang dimiliki mustahik dan menjunjung keadilan sosial yang sudah diterapkan oleh Negara.

Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pekerjaan sosial diantaranya sebagai fasilitator, *broker*, *mediator*, pembela, dan pelindung. Lima peran ini sangat penting diketahui oleh pekerja sosial untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat yang sedang memiliki permasalahan. Menurut Soeharto (2010:98) menjelaskan lima peranan pekerja sosial dalam bidang Advokasi, yaitu:

1. Fasilitator

Dalam konteks pekerjaan sosial, peranan sebagai fasilitator sering disebut sebagai *enabler*, bahkan tidak jarang kedua istilah tersebut dipertukarkan satu sama lain. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, melakukan identifikasi dan dorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-aset sosial, pemilihan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

2. *Broker*

Istilah *broker* dalam hal ini merujuk pada pengertian bahwa pekerja sosial melakukan peranannya sebagai penghubung antara klien dengan penyedia layanan yang dibutuhkan. Pekerja sosial harus mampu menjamin agar klien memperoleh pelayanan yang baik, sehingga mereka dapat memperoleh sumber-sumber yang merupakan kebutuhan bagi dirinya.

3. *Mediator*

Dalam perspektif pekerjaan sosial, peranan sebagai *mediator* dapat diartikan sebagai seseorang yang menjadi penengah dalam penyelesaian suatu kasus/permasalahan. Pekerja sosial menjadi orang ketiga dalam penyelesaian sebuah kasus tertentu, pekerja sosial harus menghasilkan sesuatu yang positif agar dapat menghindari pihak yang terkait mengalami kerugian. Dalam hal ini pekerjaan sosial harus bersifat netral, artinya dia tidak berpihak kepada siapapun, melainkan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalur perdagangan.

4. Pembela

Pada umumnya pekerja sosial yang melakukan kegiatan advokasi seringkali dihadapkan dengan sistem politik dalam menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien. Pekerja sosial mampu memainkan peranannya sebagai pembela, jika pelayanan yang ada dan sumber-sumber sangat sulit dijangkau oleh klien.

5. Pelindung

Pekerja sosial harus mampu menjadi pelindung bagi orang-orang yang tidak berdaya. Disini, pekerja sosial melakukan peranannya sebagai pelindung dengan berdasarkan pada kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang rentan lainnya. Intervensi merupakan kegiatan pemecahan masalah penerima pelayanan, dalam pelaksanaannya pekerja sosial dituntut untuk melibatkan penerima pelayanan secara aktif pada setiap kegiatan yang dilaksanakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial haruslah menguasai lima peranan tersebut agar memudahkan pekerja sosial untuk menyelesaikan sebuah permasalahan-permasalahan tertentu. Diantaranya pekerja sosial harus bisa menjadi fasilitator agar dapat memenuhi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian pekerja sosial harus bisa menjadi seorang penghubung antara masyarakat dan sistem sumber/ lembaga yang member pelayanan. Selain itu

pekerja sosial harus dapat membela dan melindungi masyarakat dari gangguan dari pihak-pihak tertentu.

D. Masalah Sosial

Secara luas, masalah sosial sangatlah sederhana untuk diartikan. Menurut Janssen (1992:42) yang dikutip oleh Suharto (2005:83), masalah sosial secara umum didefinisikan sebagai berikut : “perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya”. Dalam hal ini, masalah difokuskan kepada masalah sosial.

Menurut Horton dan Leslie dalam Suharto (2005:82) mendefinisikan masalah sosial sebagai berikut : “suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif”. Dari definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, maka masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang. Kasus

kejahatan kriminalitas akhir-akhir ini sangat ramai diberitakan di koran maupun televisi. Kriminalitas adalah masalah sosial.

2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Menurut paham hedonism, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran 'baik' atau 'buruk' sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat. Penggunaan narkoba, minuman keras, homoseksual, bahkan bunu diri adalah masalah sosial, apabila ilai atau norma masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau bertentangan dengan aturan-aturan umum. Tetapi pada masyarakat yang memandang penggunaan minuman keras, misalnya sebagai sesuatu yang 'wajar' dan 'biasa', penggunaan *whisky*, *jhony walker* atau *sampagne* bukanlah masalah sosial, meskipun dilakukan banyak orang.
3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat sakit kepala. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial,

karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai diperbincangkan dan diseminarkan, karena dianggap sebagai masalah sosial.

4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksis sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadinya ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar dan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan tolak ukur kemiskinan yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (2004:79) yang menyatakan, bahwa: “Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar atau ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar”. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang tidak hanya menyangkut aspek-aspek material saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek non

material sehingga kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang serius bagi kita semua.

Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merabah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas. sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang dibawah dan di atasnya. SMERU dalam Suharto (2010:132) memberikan gambaran tentang ciri-ciri masyarakat miskin yang mencoba melihat kemiskinan secara lebih komprehensif, yaitu dari segi kemiskinan individu dan kemiskinan secara struktural, yaitu sebagai berikut:

- a) ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
- b) ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
- c) ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- d) kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun missal
- e) rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam
- f) keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
- g) ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
- h) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- i) ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tidak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil)

Adapun ciri-ciri masyarakat miskin yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan yang terjadi dimasyarakat bukan saja dapat dilihat sebagai kemiskinan secara individu dari sisi ekonomi saja, akan tetapi kemiskinan juga dapat dilihat sebagai kemiskinan yang terjadi secara struktural dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kemiskinan pada umumnya kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang diterapkan pada fakir miskin menurut Depsos (2001) dalam Suharto (2010:134) bahwa: “Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fakir miskin merupakan orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebuhan-kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, pendidikan serta materi yang mencukupi.

b. Faktor Kemiskinan

Terdapat beberapa faktor yang bersifat internal maupun eksternal yang menyebabkan kemiskinan seseorang, sehingga dia mengalami beban yang sangat berat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemiskinan dapat terjadi diakibatkan oleh beberapa kekurangan yang dimiliki oleh individu dan kelompok masyarakat

lainnya yang dapat menghambat seseorang untuk memperoleh kemajuan dalam kehidupannya.

Kemiskinan dalam hal ini diakibatkan oleh adanya sifat malas, kurangnya kemampuan intelektual, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan dan rendahnya kemampuan pada individu tersebut untuk merespon persoalan yang dialami dalam kehidupannya, sehingga ia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Hikmat (2005) dalam Hafsah (2008:32) mengemukakan bahwa faktor penyebab kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain berupa kekurangan kemampuan dalam hal:

- Fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan)
- Intelektual (kurangnya pengetahuan, kekurangan informasi)
- Mental emosional (misalnya malas, mudah menyerah, putus asa, temperamental)
- Spiritual (misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin)
- Sosial psikologis (kurang motivasi, kurang percaya diri, kurang relasi, depresi, kurang mampu mencari dukungan)
- Keterampilan (tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan pekerjaan)
- Asset (tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan, dan modal kerja).

b. Faktor eksternal

Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain:

- Terbatasnya pelayanan sosial dasar
- Tidak dilindungi hak atas kepemilikan tanah
- Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal
- Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro
- Belum terciptanya system ekonomi kerakyatan dengan prioritas sector riil masyarakat banyak.
- Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal (seperti zakat)
- Dampak sosial negatif dan program penyesuaian structural
- Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan
- Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana
- Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material
- Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata
- Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

Dengan demikian, faktor internal dan eksternal tersebut mengakibatkan kondisi fakir miskin atau mustahik yang menjadikan tidak mampu dalam hal:

- Memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, air bersih, kesehatan dasar, dan pendidikan dasar.
- Menampilkan peranan sosial, seperti tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, sebagai orangtua, dan sebagai warga masyarakat dalam suatu lingkungan komunitas.
- Mengatasi masalah-masalah sosial psikologis yang dihadapinya seperti konflik kepribadian, stress, kurang percaya diri, masalah keluarga, dan keterasingan dari lingkungan.
- Mengembangkan potensi diri dan lingkungan, seperti keterampilan wirausaha, keberanian memulai bisnis, membangun jaringan, akses informasi, dan sebagainya.
- Mengembangkan faktor produksi sendiri, seperti kepemilikan tanah yang terbatas, tidak ada sarana dan prasarana produksi

Akibat faktor-faktor internal dan eksternal tersebut mendorong orang-orang miskin masuk kedalam perangkap lingkaran kemiskinan (*poverty circletrap*). Mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

E. Teori Partisipasi

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) manusia senantiasa diharapkan saling berhubungan baik terhadap sesamanya, memiliki rasa kebersamaan, hidup tolong

menolong, saling bekerjasama, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Begitu pula halnya dalam melaksanakan tugas kehidupan dan pembangunan bangsanya manusia dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Pernyataan ini mengisyaratkan, untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri.

1. Pengertian Partisipasi

Menurut kamus, "*participation*" tidak lain adalah *act of participating* (kata kerja transitif *participate*: "*have a share or take part*), oleh Poerwadarminta diterjemahkan sebagai pengambilan bagian atau keikutsertaan (Poerwadarminta, 1961: 650). Sedangkan definisi konseptual dari Keith Davis dalam Huraerah (2011:109) adalah: "*Participation is defined as mental and emotional involvement of persons in group situations that encourage them to contribute to group goals and share responsibility for them*". Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya.

Dari rumusan tersebut, bisa diketahui, arti partisipasi bukan sekedar mengambil bagian atau pengikutsertaan saja tetapi lebih dari itu pengertian tersebut terkandung tiga gagasan pokok, yaitu *mental and emotional involvement* (keterlibatan mental dan emosi), *motivation to contribute* (dorongan untuk memberikan sumbangan), dan *acceptance of responsibility* (penerimaan tanggung jawab).

Seorang ahli ekonomi kerakyatan, Mubyanto (1997) mengatakan pengertian dasar pengertian dasar partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Sementara itu, Sulaiman (2006: 6), seorang ahli pekerjaan sosial, mengungkapkan partisipasi sosial sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat secara perorangan, kelompok, atau dalam satu kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam atau di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosialnya.

Kemudian, dengan mengutip beberapa pendapat ahli barat, Ndraha dalam Huraerah (2011:110) menyimpulkan, partisipasi masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai satu di antara titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya)
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana)
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil dari pembangunan (*participation in benefit*)
- f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

Definisi partisipasi yang dikemukakan Mubyarto, Sulaiman, dan Ndraha tersebut, kita dapat mengetahui bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengertian

yang luas. Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan saja seperti halnya ditafsirkan masyarakat awam pada umumnya, tetapi meliputi kegiatan pengambilan keputusan, penyusunan program, perencanaan program, pelaksanaan program, mengembangkan program, dan menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Dari penjelasan tersebut mengandung arti seseorang, kelompok, atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi.

Bentuk partisipasi yang dimaksudkan adalah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok, atau masyarakat yang berpartisipasi. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, menurut Pasaribu dan Simanjuntak dalam Huraerah (2011:116) memperinci jenis-jenis partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian, kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyambungan, mulang sambung.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan, diantaranya ada partisipasi buah pikiran yaitu masyarakat dapat memberikan sebuah idea tau dapat menuangkan sebuah aspirasinya sehingga kegiatan yang dilakukan akan berjalan dengan baik, selain itu ada jenis partisipasi lain yaitu partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, keterampilan dan pasrisipasi sosial. Sedangkan menurut Sulaiman dalam Huraerah (2011) membagi bentuk-bentuk partisipasi sosial ke dalam lima macam, yaitu:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana, dan sarana sebaiknya dating dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Partisipasi representative dengan memberikan kepercayaan dan mandate kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Dengan memperhatikan kedua pendapat tentang bentuk-bentuk partisipasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sebetulnya tidak ada perbedaan yang mencolok karena hal tersebut memiliki maksud yang sama. Maksud dari pembagian partisipasi adalah untuk menunjukkan luasnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan orang jika akan berpartisipasi. Dengan kata lain, untuk berpartisipasi sumbangan orang hendaknya jangan dilihat hanya dari jumlah tenaga dan harta benda yang diberikan. Karena jika partisipasi dibatasi pada sumbangan tenaga dan harta benda saja, berarti mereduksi esensi konsep dasar partisipasi tersebut.

3. Pengelompokan Partisipasi Masyarakat

Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama jika dikaitkan dengan praktik pembangunan masyarakat yang demokratis, sebagaimana dikemukakan Gaventa dan Valderama dalam Suhirman (2003), yaitu :

- Partisipasi politik : representative dalam demokrasi. Tujuan untuk mempengaruhi dan mendudukan wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan daripada melibatkan langsung masyarakat dalam proses-proses pemerintahan.
- Partisipasi sosial : keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dipandang sebagai “*beneficiary*” pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi program. Dengan demikian, partisipasi diletakkan di luar lembaga formal pemerintahan seperti forum warga.
- Partisipasi warga : pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan public. Warga berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya dalam sebagai penerima (objek), tetapi sebagai subjek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

F. Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial (*social functioning*) adalah suatu konsep kunci untuk memahami kesejahteraan sosial, dan merupakan konsep yang penting bagi pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial merupakan sebuah konsep pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Menurut Moreles dan Sheafor (1999) dalam Fahrudin (2012:42) bahwa:

Social function is a helpful concept because it takes into consideration both the environment characteristics of the person and the forces from the environment. It suggest that a person brings to the situation a set of behaviors, needs, and beliefs that are the result of his or her unique experiences from birth. Yet it also recognizes that whatever is brought to the situation must be related to the world

as that person confronts it. It is in the transactions between the person and the parts of that persons world that the quality of life can be enchanded or damaged.

Konsep keberfungsian sosial tidak terlepas dari karakteristik orang dalam konteks lingkungan sosialnya. Keberfungsian sosial menunjuk pada cara-cara individu-individu maupun kolektivitas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu keberfungsian seseorang sangat berkaitan dengan peranan-peranan sosialnya. Keberfungsian sosial dapat pula diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dalam menampilkan beberapa peranan yang diharapkan atau yang dapat ditampilkan oleh setiap orang karena keanggotaannya dalam kelompok-kelompok sosial.

Keberfungsian Sosial merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Dengan kata lain keberfungsian sosial adalah kemampuan untuk melaksanakan peran sosial seperti yang diamanahkan oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat. Merujuk kepada Suharto (2009:5) mengatakan keberfungsian sosial adalah: “Kemampuan orang (individu, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga, dan jaringan sosial) dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan”. Dapat diambil kesimpulan bahwa keberfungsian sosial merupakan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan, menjalankan peranan sosialnya dan menghadapi goncangan dan tekanannya.

Keberfungsian sosial positif adalah kemampuan orang untuk menangani tugas-tugas dan aktivitasnya yang penting dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan peranan sosial utamanya sebagaimana yang diharapkan oleh kebudayaan dari suatu komunitas yang khusus. Peranan sosial yang utama yaitu menjadi anggota dalam keluarga, orang tua, pasangan, mahasiswa, pasien, pegawai, tetangga dan warga Negara. Peranan sosial orang berubah melalui sebuah kehidupan dan harapan tentang peranan ini berbeda tergantung kepada gender orang, suku bangsa, budaya, agama, pekerjaan dan komunitas. Sebagian ahli berpendapat bahwa konsep keberfungsian sosial terfokus pada keserasian antara kapasitas individu dengan tindakan dan permintaan, harapan, sumber-sumber serta kesempatan dalam lingkungan sosial dan ekonominya.

Pekerjaan sosial sangat berhubungan dengan keberfungsian sosial semua orang tapi prioritasnya yaitu pada masalah pemenuhan kebanyakan anggota-anggota masyarakat yang rentan. Pada dasarnya masyarakat yang rentan ini adalah korban dari situasi pengabaian, ketidakadilan sosial, diskriminasi dan penindasan. Termasuk yang di dalamnya anak-anak, dan remaja, lansia, perempuan, individu yang hidupnya dalam kemiskinan, individu yang memiliki keterbatasan fisik, orang yang sakit mental dan emosiaonal, gay dan lesbian, dan kelompok minoritas.

Pekerja sosial dalam melaksanakan komitmen, untuk meningkatkan keberfungsian sosial orang, pekerja sosial menangani penyediaan intervensi sosial bagi mereka yang mempunyai keterbatasan kapasitas dan kesempatan untuk berfungsi

secara penuh. Intervensi sosial dapat meliputi tindakan dan upaya yang dirancang agar orang dapat memenuhi kebutuhan dan akses terhadap kebutuhan dasar (misalnya makan, tempat tinggal, perlindungan dari bahaya) dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan psikososial seperti, rasa memiliki, penerimaan dan ketenangan pada saat mengalami tekanan. Dalam intervensi sosial, fokusnya adalah menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan atau menolong klien agar bisa merasa nyaman walaupun sedang mengalami kesulitan.

Keberfungsian sosial menunjukkan keseimbangan pertukaran, kesesuaian, kecocokan, dan penyesuaian timbal balik antara orang, secara individual atau secara kolektif, dan lingkungan mereka. Keberfungsian sosial dinilai berdasarkan apakah keberfungsian sosial tersebut memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada orang dan komunitasnya, dan apakah keberfungsian sosial itu normal dan dibenarkan secara sosial. Adapun menurut Salamah (2011) membagi aspek-aspek dari keberfungsian sosial, diantaranya:

- a. Status Sosial, setiap orang pasti mempunyai status sosial terkadang seseorang mempunyai status sosial jamak. Misalnya, sebagai orangtua, suami, atau pegawai.
- b. Interaksional, setiap status sosial dilakukan melalui berinteraksi. Misalnya interaksi orang tua dan anak, suami dan istri.
- c. Tuntutan dan harapan, setiap status sosial menuntut tingkah laku yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma atau nilai setempat. Misalnya, status sosial orang tua dituntut untuk dapat mendidik anak, member contoh, dan sosialisasi.
- d. Tingkah laku, setiap orang dituntut untuk dapat melaksanakan peran atau tingkah laku sesuai dengan statusnya. Ketidak sesuaian antara peranan yang ditampilkan dengan yang diharapkan dapat menimbulkan masalah
- e. Situasional, orang bertingkah laku selalu dalam konteks situasi sosial. Situasi sosial merupakan keadaan yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan status sosial seseorang, bagaimana orang-orang dapat berinteraksi dengan lingkungannya, seseorang memiliki sebuah tuntunan untuk menjalankan hidup agar berjalan sesuai dengan pengharapan, selain itu setiap orang akan berkaitan dengan tingkah laku yang akan menunjukkan status sosialnya dan yang terakhir seseorang dapat bertingkah laku sesuai dengan konteks sosial yang memungkinkan terjadinya sebuah interaksi sosial.

G. Lembaga Amil Zakat/Lembaga Sosial

a. Karakteristik Lembaga Sosial

Menurut Soeharto (1997 : 309-310) karakteristik lembaga sosial dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Sumber daya (baik dana maupun barang), berasal dari para donator yang mempercayakannya kepada para lembaga. Para donator tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari lembaga tersebut.
- b. Menghasilkan berbagai jenis jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat dhuafa. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk memperoleh laba/keuntungan.
- c. Kepemilikan lembaga sosial, dalam hal ini lembaga zakat, tidak identik dengan lazimnya pada lembaga bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang bersepakat dan memiliki komitmen untuk mendirikan lembaga tersebut pada awalnya kemudian, lembaga tersebut bukanlah milik sendiri,

melainkan milik umat, masyarakat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi berasal dari masyarakat dan untuk kemaslahatan umat/masyarakat.

- d. Misi utama dan tujuan organisasi diwarnai juga dengan adanya nilai-nilai pekerjaan sosial, bukan nilai ekonomi semata. Oleh karena itu, lembaga tersebut menghasilkan pelayanan senantiasa tidak “bebas nilai” (*value free*), melainkan “syarat nilai” (*value laden*).
- e. Teknologi bukan terletak pada mesin, melainkan pada manusia. Tanpa kehadiran mereka, tidak ada produk. “*No man no product*”. Dari empat aspek teknologi, *humanware*, *technoware*, *organware*, *infoware*, aspek manusialah (*humanware*) yang menentukan proses produksi organisasi.

b. Prinsip Lembaga Amil dan Zakat

Menurut Lembaga Amil dan Zakat dari Sinergi Foundation ada beberapa prinsip lembaga sebagai berikut:

1. Moral

Syariah dan akhlakul karimah

2. Kedudukan

Objektif dan independen

3. Manajemen

Professional, transparan, kreatif dan inovatif, berorientasi pada perbaikan terus menerus.

4. Aktifitas Inti

Layanan pengelolaan zakat, infak-shadaqoh dan wakaf

5. Fiqh

Bukan semata ibadah ritual, tetapi lebih bernilai guna

Selain itu ada beberapa tambahan prinsip lainnya dari Sinergi Foundatoin, yaitu sebagai berikut:

1. Disiplin

Melaksanakan tugas secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat manfaat serta bertindak sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku dengan penuh tanggung jawab.

2. Pelayanan Optimal

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan layanan terbaik kepada seluruh mitra dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati sehingga dapat memberikan kepuasan serta berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

3. Amanah

Terpercaya dengan penuh tanggung-jawab, mengembangkan budaya kerja yang sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada.

4. Empati

Mengembangkan budaya kerja yang mampu memahami jiwa dan perasaan mustahik dan sesame rekan kerja, kemudian ikut berupaya semaksimal mungkin untuk membantunya.

5. Teamwork

Kerjasama yang didasari semangat saling menghargai dan menghormati untuk mencapai hasil yang terbaik, bersedia bekerja dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan dedikasi dan mengembangkan lingkungan kerja.

H. Mustahik

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat atau infak/sedekah. Menurut Helmi Masdar (2001:47) Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya :

- Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya;
- Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai harta yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya.
- Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti, menghitung, menyetor dan menyalurkan kepada mustahiknya;
- Mualaf ialah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam atau lebih memantapkan keyakinannya kepada Islam;
- Riqab ialah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
- Gorimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;
- Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat;
- Ibnu-sabil ialah orang lain untuk melintasi dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

Uraian diatas menjelaskan hanya ada 8 golongan yang bisa atau berhak mendapatkan zakat. Diantaranya adalah seseorang yang tidak memiliki kerja dan penghasilan, seseorang yang memiliki harta namun penghasilan yang kurang mencukupi bagi kehidupannya, orang yang mengolah zakat pun berhak untuk mendapatkan zakat dan seseorang yang memantapkan hatinya untuk yakin pada islam serta orang orang yg sedang ada di perjalanan dan yang terakhir adalah seseorang yang dililit oleh hutang.

I. Rentenir

Rentenir adalah merupakan seseorang yang secara informal menawarkan/memberikan pinjaman (kredit) kepada nasabah berupa uang dengan membebankan bunga yang cukup atau sangat tinggi. Sedagkan meurut pengertian Kamus besar Bahasa Indonesia (190 : 743) rentenir atau sering disebut lintah darat berarti orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Menurut Musani (1981 : 82) pengertian rentenir tersebut berasal dari bahasa Belanda “rente” yang berarti bunga uang atau riba. Sedangkan pengertian rentenir menurut Sinergi Dompot Dhuafa Jabar adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Dapat pula dikatakan bahwa rentenir adalah pelaku usaha di bidang ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau sebuah lembaga yang terorganisir menghimpun dana, meyalurkan kredit, menetapkan bunga kepada masyarakat secara tidak sah tanpa izin pejabat berwenang.

Adapun bentuk-bentuk rentenir menurut Sinergi Dompot Dhuafa Jabar yaitu terbagi menjadi rentenir perorangan, dan rentenir terorganisir. Dalam rentenir perorangan pemilik dana turun langsung ke masyarakat dalam memberikan dana pinjaman, sekaligus merangkap menjadi juru tagih. Sedangkan yang dimaksud dengan rentenir terorganisir yakni dana pinjaman diserahkan melalui bagian penyediaan dan atau kredit dan penagih diserahkan ke bagian *collection* yang khusus menangani nasabah-nasabah yang dianggap macet dalam melakukan pembayaran.

J. Advokasi

Kata advokasi berasal dari Bahasa Belanda yakni *advocate, advocator* yang memiliki arti yakni pengacara hokum, pembela. Sedangkan istilah advokasi dalam bahasa inggris dalam Topatimasang, et al (2000 : 7) adalah: “*to defend* (membela), *to promote* (megemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan)”.

Oleh karena itu, advokasi tidak hanya berarti membela atau mendampingi orang lemah, melainkan juga bersama-sama dengan mereka melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan terorganisir dengan baik. Skidmore dan Thackeray (1982:7) mengemukakan bahwa: “Pelayanan advokasi merupakan aktivitas/kegiatan intervensi dengan tujuan untuk memberikan pertolongan kepada klien untuk mendapatkan kebutuhan mereka, terutama pada sistem yang tidak mendukungnya”.

Saat seorang individu maupun kelompok masyarakat lemah dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan khusus dimana terdapat sumber-sumber atau organisasi sosial tetapi tidak dapat memberikan pertolongan kepada individu tersebut, maka kehadiran seorang yang dapat mewakili aspirasinya sangat dibutuhkan. Ambrosino (1979) dalam Robert L, et al (2001 : 61) mengemukakan bahwa: "*Advocacy as helping clients obtain necessary assistance from community resources*". (advokasi merupakan kegiatan membantu klien untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat). Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa advokasi adalah salah satu bentuk kegiatan yang merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus diperankan oleh seorang pekerja sosial untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan klien yang mereka wakili.

Advokasi dilakukan untuk meningkatkan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Keadilan sosial adalah merupakan salah satu nilai dasar advokasi pekerja sosial. Hal ini sesuai dengan kode etik NASW (1996) dalam Robert L, et al (2001:78) menyatakan bahwa : "*Social worker strive to end discrimination, oppression, poverty, and other forms of social injustice by activities in the form of direct practice advocacy, social and political action, policy development, etc*". Para pekerja sosial berusaha untuk mengakhiri diskriminasi, penindasan, kemiskinan, dan bentuk ketidakadilan sosial lainnya melalui kegiatan dalam bentuk praktik langsung Advokasi, aksi sosial dan politis, pembangunan kebijakan, dan sebagainya.

Berdasarkan kode etik NASW di atas, maka pekerja sosial dalam kegiatan advokasi sering terlibat dalam pembelaan tentang isu keadilan dan berupaya untuk

menemukan sumber yang dibutuhkan oleh klien. Biasanya pekerja sosial sering berdebat, berbicara dengan lantang, dan berhadapan dengan ketidakadilan ketika hak-hak klien terabaikan. Pengertian advokasi menurut Hurdi (1994 : 1) dalam Ensiklopedia Mini Pekerjaan Sosial, adalah sebagai berikut : “Salah satu bentuk kegiatan atau tindakan pekerja sosial yang atas nama kliennya berupaya secara persuasif memperjuangkan hak-hak martabat klien tersebut. ini merupakan kewajiban dasar profesi pekerjaan sosial dan anggota-anggota profesi tersebut. asumsi yang mendasarinya adalah bahwa ada hal-hal tertentu baik yang menyangkut praktek, pengaturan perundang-undangan, birokrasi dan kondisi-kondisi umum yang mempersulit individu untuk menerima pelayanan-pelayanan, menggunakan sumber-sumber atau memperoleh pertolongan bantuan”.

Berkenaan dengan definisi advokasi yang dikemukakan di atas, maka dalam hal ini pekerja sosial memiliki kewajiban untuk menjalankan perannya sebagai advokasi. Karena tidak jarang seorang individu, kelompok, maupun masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi situasi yang sulit bagi mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Saat mereka tidak berdaya dan tertindas serta tidak bisa menyelesaikan permasalahannya seorang diri, maka disitulah pekerja sosial berperan.

Ketika klien (individu, kelompok, maupun masyarakat) yang tidak berdaya mengalami ketidakadilan, maka kehadiran pekerjaan sosial yang dapat memainkan peran sebagai advokat. Pekerja sosial dapat memainkan perannya sebagai advokat, pekerja sosial bertujuan untuk membantu pelayanan yang ada untuk membantu klien

agar dapat memperoleh akses pelayanan, sehingga klien memperoleh apa yang ia butuhkan.

Advokasi merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang bertujuan untuk mengusahakan tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi individu maupun kelompok untuk membuat keputusan yang dapat membuat orang-orang merasa peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak berdaya dan terampas haknya.

Peran pekerja sosial dalam pemberian bantuan bagi klien melalui pelaksanaan pelayanan advokasi adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks profesi pekerjaan sosial. Hal ini adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pekerja sosial beserta para anggotanya. Pelaksanaan advokasi yang efektif dapat dicapai dengan ikut berpartisipasi dalam membangun koalisi serta bersekutu dengan pihak lain yang memiliki tujuan yang sama.

Hepworth dan Larsen (dalam Kirst, 1993 : 470) menyatakan bahwa peranan sebagai advokasi dapat diperankan apabila keadaan/situasi terdapat indicator-indikator sebagai berikut :

- a. Jika badan pelayanan atau orang-orang yang menjadi staf menolak untuk menyalurkan semua pelayanan-pelayanan atau kepentingan yang sudah menjadi hak klien.
- b. Jika pelayanan-pelayanan yang disalurkan itu melalui bentuk dan sikap dehumanisme.

- c. Jika klien mengalami perlakuan secara diskriminasi karena agama, ras, warna kulit dan faktor lainnya.
- d. Jika jarak antar pelayanan-pelayanan dengan manfaat menyebabkan kesulitan atau memberikan kontribusi untuk disfungsi.
- e. Jika pemerintah atau kebijakan badan tidak memiliki efek yang merugikan kepada masyarakat yang membutuhkan sumber-sumber dan memanfaatkannya.
- f. Jika klien ini tidak mampu bertindak secara efektif atas nama mereka sendiri.
- g. Jika terdapat banyak orang mempunyai kebutuhan yang sama dan dimana sumber-sumbernya tidak tersedia.
- h. Jika klien memiliki kebutuhan yang tidak umum pada pelayanan-pelayanan dan kepentingan yang darurat karena krisis.
- i. Jika klien diingkari hak-halnya sebagai penduduk dan sebagai individu.
- j. Jika prosedur-prosedur atau fasilitas-fasilitas dari organisasi mempunyai efek yang merugikan terhadap klien.

Pelaksanaan pelayanan advokasi pada umumnya bertujuan untuk melakukan kegiatan/tindakan atas nama klien serta bersama-sama dengan klien membantu mereka mencapai hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Sehingga profesi pekerjaan sosial dalam melakukan pelayanan advokasi mampu memberikan jaminan kepada klien dalam memperoleh hak-hak mereka serta menghubungkan mereka dengan sistem sumber yang dapat memenuhi kebutuhannya.